

**ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN VERBAL
(*CATCALLING*) MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

PUTRI OKTAVIA

NPM:21100026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

2024/202

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Putri Oktavia

NPM : 21100026

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

JUDUL : ANALISIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PELECEHAN VERBAL
(*CATCALLING*) MENURUT PASAL 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL.

Palembang, Juni 2025

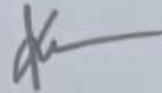
Menyetujui

Pembimbing I

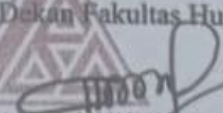


H. Yudi Fahrian, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Kartika Sasi, S.H., MH

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum

Erniwati, S.H., M.Hum.
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Oktavia

NPM : 21100026

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 10 Oktober 2003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, imprestasi, serta pernyataan dalam persembahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah di tetapkan.
2. Karya ilmiah ini yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UNIVERSITAS IBA maupun di perguruan tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran dalam pernyataan ini tersebut diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.

Palembang, Juni 2025



MOTTO

"The only source of knowledge is experience."

**"SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA
KEMUDAHAN."**

(QS. Al-Insyirah: 6)

Kupersembahkan Kepada :

1. Ibuku yang selalu memberikan semangat, menjadi suport system, dan senantiasa menyayangiku sedari dulu hingga nanti, terimakasih atas pengorbanan yang sangat luar biasa yang telah ibu berikan sampai penulis bisa melalui masa masa yang sangat luar biasa ini.
2. Alm. Kakekku cinta pertamaku yang selalu menjadi panutanku, cinta kasihku, dan orang yang sangat berarti dalam hidupku.
3. Adik-adikku, Tante ku, Uwoku dan Nenekku yang selalu mendukung dan mendoakanku.
4. Seseorang yang sangat berarti kehadirannya di dalam hidupku, yang senantiasa menemaniku, baik susah maupun senang.
5. Sahabatku yang selalu menguatkan, dan selalu menyemangatiku.
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum, yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Dan teman-teman angkatanku yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terima kasih banyak.

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah "**Analisis Tindak Pidana Pelecehan Verbal (*Catcalling*) Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual**". Penelitian ini mengkaji pelecehan verbal (*catcalling*) yang bertentangan dengan norma moral. *Catcalling* merupakan jenis pelecehan yang dapat membuat korban merasa tidak nyaman, terancam, atau tidak aman, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Saat ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak secara tegas menyatakan bahwa *catcalling* termasuk pelecehan non-verbal. Penelitian ini mempertanyakan: Bagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual mengatur pelecehan verbal (*catcalling*)? Selain itu, mengapa pelaku *catcalling* tidak dihukum sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang berfokus pada aturan dan gagasan hukum. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Pasal 5 UU 12/2022 Tentang Pelecehan Verbal belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan terdapat perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dan apa yang sebenarnya terjadi (*das sein*). Implementasi juga terhalang oleh berbagai hambatan, seperti hambatan yuridis dikarenakan dalam kasus pelecehan verbal sulit untuk melakukan pembuktian, hambatan sosiologi meliputi prosedur yang kompleks karena koordinasi antar lembaga yang kurang optimal serta hambatan sosiologi yang membuat korban takut untuk melapor karena stigma sosial dan ketakutan terhadap realitas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penyusunan petunjuk pelaksanaan yang operasional, pelatihan sensitif gender bagi penegak hukum, prosedur pelaporan yang ramah korban, dan peningkatan kesadaran hukum.

ABSTRACT

The title of this research is "Analysis of the Criminal Act of Verbal Harassment (Catcalling) According to Article 5 of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Harassment." This research examines verbal harassment (catcalling) that is contrary to moral norms. Catcalling is a type of harassment that can make the victim feel uncomfortable, threatened, or unsafe, as stated in Article 5 of Law Number 12 of 2022. Currently, Law Number 12 of 2022 does not expressly state that catcalling is non-verbal harassment. This research asks: How does Article 5 of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence regulate verbal harassment (catcalling)? Furthermore, why are catcallers not punished according to Article 5 of Law Number 12 of 2022? This research uses a legal research method that focuses on legal rules and ideas. The research results show that the implementation of Article 5 of Law 12/2022 concerning Verbal Harassment is not yet optimal. This is due to a discrepancy between what should happen (das dsollen) and what actually happens (das sein). Implementation is also hampered by various obstacles, such as legal obstacles due to the difficulty of proving cases of verbal harassment; sociological obstacles, including complex procedures due to suboptimal coordination between institutions; and sociological obstacles that make victims afraid to report due to social stigma and fear of reality. To address this, it is necessary to develop operational implementation guidelines, gender-sensitive training for law enforcement, victim-friendly reporting procedures, and increased legal awareness.

Keywords: Catcalling, TPKS Law, Law Implementation, Barriers to Law Enforcement

